

Determinan sosial-ekonomi pertumbuhan kawasan kumuh perkotaan: Analisis pengaruh urbanisasi, pengangguran, dan kemiskinan di Kota Makassar

Muhriza Ramadani*, Basri Bado, Citra Ayni Kamaruddin, Regina, Abd Rahim
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar, Indonesia

*) Korespondensi (e-mail: muhrizaramadani@gmail.com)

Abstract

Slum settlement growth remains a persistent challenge in developing countries, particularly in Indonesian cities experiencing rapid urbanization. Previous studies have examined urbanization, unemployment, and poverty separately as determinants of slum development, yet limited evidence exists regarding their simultaneous influence in Eastern Indonesia. This study analyzes the effects of urbanization, open unemployment, and poverty on the extent of slum settlements in Makassar City during 2015–2024. The study used a quantitative approach with secondary time-series data and multiple linear regression analysis. The findings indicate that urbanization and open unemployment positively affect slum settlement growth, while poverty has a negative effect. These results suggest that slum development dynamics are shaped not only by demographic and labor market factors but also by government interventions that improve settlement conditions. Therefore, sustainable slum reduction requires integrated policies focusing on urbanization management, employment creation, poverty alleviation, and the provision of adequate housing and urban infrastructure.

Keywords: Urbanization, Unemployment, Poverty, Slum Settlements, Makassar.

Abstrak

Pertumbuhan kawasan permukiman kumuh di perkotaan masih menjadi tantangan yang dihadapi banyak kota di negara berkembang, termasuk Indonesia, seiring dengan meningkatnya laju urbanisasi. Penelitian terdahulu umumnya mengkaji urbanisasi, pengangguran, dan kemiskinan sebagai faktor yang berdiri sendiri, sedangkan kajian yang menganalisis pengaruh ketiganya secara simultan pada konteks Indonesia Timur masih terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh tingkat urbanisasi, tingkat pengangguran terbuka, dan tingkat kemiskinan terhadap luas kawasan permukiman kumuh di Kota Makassar periode 2015–2024. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder deret waktu yang dianalisis menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat urbanisasi dan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif terhadap luas kawasan permukiman kumuh, sedangkan tingkat kemiskinan berpengaruh negatif. Temuan ini mengindikasikan bahwa pengurangan kawasan permukiman kumuh memerlukan kebijakan yang terpadu melalui pengendalian urbanisasi, perluasan kesempatan kerja, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan penyediaan hunian layak dan infrastruktur perkotaan secara berkelanjutan.

Kata kunci: Urbanisasi, Pengangguran, Kemiskinan, Permukiman Kumuh, Makassar.

How to cite: Ramadani, M., Bado, B., Kamaruddin, C. A., Regina, R., & Rahim, A. (2026). Determinan sosial-ekonomi pertumbuhan kawasan kumuh perkotaan: Analisis pengaruh urbanisasi, pengangguran, dan kemiskinan di Kota Makassar. *Journal of Economics Research and Policy Studies*, 6(2), 775–788. <https://doi.org/10.53088/jerps.v6i2.3158>



1. Pendahuluan

Kualitas dan kondisi permukiman di Indonesia hingga saat ini masih menjadi permasalahan yang kerap dijumpai. Hal ini disebabkan oleh lemahnya sistem perencanaan permukiman, penurunan kualitas lingkungan hunian, serta belum optimalnya kinerja kelembagaan dalam penyediaan sarana dan prasarana permukiman (Hartanto, 2025). Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat luas kawasan permukiman kumuh di Indonesia pada tahun 2014 mencapai 38.431 Ha, yang menjadi target penanganan dalam RPJMN Tahun 2020–2024 dengan sasaran 0% luasan kumuh, 100% akses sanitasi, dan 100% akses air minum.

Kondisi kawasan perkotaan yang semakin sulit dikendalikan akibat tekanan urbanisasi yang melampaui kapasitas daya tampung telah melahirkan sejumlah problematika baru, antara lain meningkatnya intensitas tindak kejahatan yang dipicu oleh kondisi kemiskinan struktural, meluasnya fenomena pengangguran, bertambahnya sebaran kawasan permukiman tidak layak huni, serta berbagai dampak negatif lain yang menyertainya. Berdasarkan hal tersebut, urbanisasi perlu diposisikan sebagai variabel determinan yang memberikan pengaruh bermakna terhadap trajektori perkembangan suatu kota, baik dalam aspek perubahan fisik-spasial maupun dalam dimensi transformasi sosial kemasyarakatan (Yunus, 2008).

Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya menyelenggarakan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) sebagai bentuk pembangunan infrastruktur daerah untuk mengurangi kawasan kumuh sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, urbanisasi yang masif di kota-kota besar tanpa pengendalian yang memadai terus menekan ketersediaan hunian layak (Rainfil, 2022). Menurut United Nations, (2019) lebih dari 55% populasi dunia kini tinggal di kawasan perkotaan dan diperkirakan meningkat menjadi 68% pada tahun 2050. Di Indonesia, laju urbanisasi mencapai sekitar 2,4% per tahun (Badan Pusat Statistika Kota Makassar, 2022).

Sejumlah kota metropolitan seperti Jakarta, Surabaya, dan Makassar menjadi destinasi primer arus migrasi penduduk. Akselerasi urbanisasi yang demikian tinggi tersebut tidak senantiasa diikuti oleh pemerataan pembangunan infrastruktur maupun redistribusi penduduk yang proporsional, sehingga mengakibatkan terjadinya kepadatan berlebih serta degradasi kualitas lingkungan di kawasan perkotaan (Firman, 2019).

Kota Makassar sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan dan pusat ekonomi Indonesia Timur mengalami pertumbuhan penduduk signifikan, dari 1,338 juta jiwa (2015) menjadi 1,424 juta jiwa (2023) (Badan Pusat Statistika Kota Makassar). Pertumbuhan ini membawa tekanan besar terhadap ketersediaan lahan dan infrastruktur. Sekitar 20% penduduk Kota Makassar tinggal di permukiman kumuh, dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencapai 10,6% pada tahun 2023 tertinggi di Sulawesi Selatan (Ramadhany, 2025). Luas kawasan kumuh sempat mencapai puncak 523,15 Ha pada tahun 2020 sebelum menurun menjadi 299,5 Ha pada tahun 2024 akibat berbagai intervensi kebijakan.

Seiring meningkatnya kepadatan penduduk akibat urbanisasi, permasalahan kawasan permukiman kumuh di Kota Makassar menjadi semakin kompleks. Studi yang dilakukan oleh Rahayu & Jaharuddin (2020) menemukan bahwa sekitar $\pm 20\%$ permukiman di pusat kota Makassar termasuk dalam kategori padat dan kumuh, dengan rasio hunian melebihi 250 jiwa per hektar jauh di atas standar ideal WHO (100 jiwa/hektar). Dampaknya, terjadi penurunan kualitas lingkungan, kemacetan lalu lintas, serta peningkatan risiko bencana seperti banjir dan kebakaran. Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi ini dapat memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi di masa depan (Sari et al., 2025).

Konteks ini sejalan dengan teori migrasi Todaro (1969) yang menjelaskan bahwa urbanisasi didorong oleh ekspektasi pendapatan lebih tinggi di kota, namun ketika kesempatan kerja tidak tersedia secara memadai, akan timbul pengangguran yang memperparah kemiskinan di kawasan permukiman kumuh (Junaidi, 2009). Secara global, urbanisasi tidak terkendali telah meningkatkan kawasan permukiman kumuh hingga 30% di Asia Tenggara dalam satu dekade terakhir (Bank Dunia, 2020).

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis pengaruh tingkat urbanisasi terhadap luas kawasan permukiman kumuh di Kota Makassar; (2) menganalisis pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap luas kawasan permukiman kumuh; (3) menganalisis pengaruh tingkat kemiskinan terhadap luas kawasan permukiman kumuh; serta (4) menganalisis pengaruh ketiga variabel tersebut secara simultan. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian ekonomi pembangunan, khususnya terkait dinamika urbanisasi, pengangguran, dan kemiskinan di wilayah perkotaan Indonesia Timur.

2. Tinjauan Pustaka

Urbanisasi dan Permukiman Kumuh

Urbanisasi merupakan proses perpindahan dan pemusatan penduduk dari daerah pedesaan ke perkotaan yang dipengaruhi faktor sosial, ekonomi, politik, dan budaya (Juniasa et al., 2024). Di negara berkembang, urbanisasi justru memperburuk permasalahan sosial ekonomi dengan meningkatnya kemiskinan dan pengangguran di kawasan permukiman kumuh (Herawati & Mesra, 2024). Permukiman kumuh ditandai oleh hunian tidak layak, kepadatan tinggi, dan keterbatasan akses terhadap fasilitas dasar yang memperkuat siklus kemiskinan.

Teori Migrasi Todaro (1969) menjelaskan bahwa keputusan migrasi merupakan fenomena ekonomi rasional berdasarkan ekspektasi pendapatan di masa depan (Santoso, 2018). Model ini merumuskan bahwa migrasi berkembang karena perbedaan pendapatan yang diharapkan antara desa dan kota. Banyak migran akhirnya tinggal di kawasan kumuh dengan tingkat pengangguran yang relatif tinggi ketika kemungkinan mendapat pekerjaan formal rendah (Rahmadana, 2020). Asumsi pokok yang diajukan adalah bahwa para pelaku migrasi melakukan evaluasi terhadap berbagai alternatif kesempatan kerja yang ada dan menetapkan pilihan yang dipandang paling optimal dalam memaksimalkan keuntungan yang mereka harapkan dari tindakan perpindahan tersebut. Adapun besaran manfaat yang diantisipasi

tersebut ditentukan oleh selisih nyata antara kondisi ketenagakerjaan di wilayah perdesaan dan perkotaan, serta peluang yang dimiliki oleh para migran untuk mendapatkan lapangan pekerjaan di wilayah urban yang menjadi tujuan perpindahan mereka (Syahrain, 2019).

Pengangguran

Secara teknis, pengangguran dapat diartikan sebagai keadaan ketika seluruh orang yang berada dalam kategori usia kerja, pada periode waktu tertentu, tidak menjalankan aktivitas kerja yang produktif, baik dalam bentuk pekerjaan yang menghasilkan imbalan upah maupun kegiatan usaha secara mandiri. Lebih lanjut, kondisi tersebut juga mencakup mereka yang secara aktif melakukan upaya perolehan pekerjaan, yakni individu-individu yang terlibat dalam berbagai kegiatan terstruktur guna mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan ekonomi mereka. Dengan demikian, pengangguran tidak semata-mata merujuk pada ketiadaan pekerjaan, melainkan juga mengindikasikan adanya ketimpangan antara ketersediaan tenaga kerja dengan peluang kerja yang ada di pasar tenaga kerja (Ardian, 2022).

Teori Pengangguran Keynesian menekankan bahwa pengangguran terjadi akibat kurangnya permintaan agregat dalam perekonomian (Meirizal et al., 2024). Tingkat pengangguran yang tinggi berkorelasi positif dengan kemiskinan, di mana penduduk perkotaan yang menganggur sulit memenuhi kebutuhan dasar dan terjebak dalam kemiskinan struktural (Anwari & Ambariyanto, 2024). Data menunjukkan TPT di Kota Makassar mencapai 15,92% pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19, sebelum berangsur menurun menjadi 9,71% pada tahun 2024 (Badan Pusat Statistika Kota Makassar, 2024).

Kemiskinan

Pinontoan (2020) dalam kajiannya menegaskan bahwa kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang paling fundamental, mengingat relevansinya yang bersentuhan langsung dengan upaya pemenuhan kebutuhan primer dalam kehidupan manusia, sekaligus merupakan isu yang bersifat universal karena dihadapi oleh banyak negara di berbagai penjuru dunia.

Menurut Jacobus (2018) di samping pengelompokan kemiskinan berdasarkan jenisnya, terdapat juga kategorisasi kemiskinan berdasarkan karakternya. Berikut adalah tipe-tipe kemiskinan berdasarkan sifatnya: (a) Kemiskinan alamiah, kemiskinan yang muncul disebabkan oleh keterbatasan sumber daya alam dan minimnya prasaran umum (jalan raya, listrik, dan air bersih), serta kondisi tanah yang tidak subur; (b) Kemiskinan buatan merupakan jenis kemiskinan yang muncul sebagai dampak dari penerapan sistem modernisasi serta paradigma pembangunan yang eksklusif, sehingga menyebabkan ketimpangan dalam kepemilikan sumber daya, alat, dan fasilitas ekonomi di tengah masyarakat.

Teori Kemiskinan Amartya Sen menekankan kemiskinan sebagai *deprivation of capabilities*, yaitu ketidakmampuan individu untuk mencapai fungsi-fungsi dasar kehidupan seperti kesehatan, pendidikan, dan partisipasi sosial bukan sekadar kekurangan pendapatan. Kemiskinan di perkotaan bersifat multidimensional,

mencakup keterbatasan akses perumahan layak, sanitasi, pendidikan, dan pekerjaan stabil (Syawaluddin, 2015). Tingkat kemiskinan Kota Makassar berfluktuasi antara 4,28% (2019) hingga 5,07% (2023), dipengaruhi oleh dampak pandemi dan dinamika pemulihan ekonomi (BPS Kota Makassar, 2024).

Penelitian Terdahulu

Khatri (2021) menemukan korelasi positif antara urbanisasi dan pertumbuhan kawasan kumuh di India periode 2001-2011 menggunakan data Sensus India, membuktikan bahwa laju urbanisasi yang tinggi secara konsisten mendorong ekspansi kawasan kumuh ketika penyediaan perumahan formal tidak memadai. Sari & Ridlo (2021) mengidentifikasi faktor ekonomi, kepadatan penduduk, dan kondisi bangunan sebagai determinan utama terciptanya permukiman kumuh di perkotaan. Pasaribu (2020) dalam kajian di Provinsi Sumatera Utara menemukan bahwa jumlah penduduk dan pengangguran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan dengan koefisien determinasi 0,8901, meski secara parsial masing-masing variabel tidak signifikan mengapa program KOTAKU berhasil menurunkan luas kumuh secara fisik namun belum sepenuhnya mengatasi kemiskinan struktural.

Oladehinde (2025) dalam studi di Ibadan, Nigeria, menggunakan analisis regresi berganda untuk mengkaji hubungan antara karakteristik sosial-ekonomi dan kondisi fisik kawasan kumuh. Hasil penelitian mengkonfirmasi bahwa pengangguran dan rendahnya pendapatan berkontribusi besar terhadap pertumbuhan kawasan kumuh, sementara ketidakamanan kepemilikan lahan memperparah kondisi hunian. Penelitian ini mendukung argumen bahwa intervensi kebijakan harus mencakup dimensi ekonomi, bukan hanya perbaikan fisik infrastruktur. Nchange (2026) menganalisis pengaruh ekonomi kreatif terhadap insiden kawasan kumuh di 115 negara berkembang selama periode 2002-2022 menggunakan teknik Driscoll-Kraay. Temuan utama menunjukkan bahwa ekspansi sektor ekonomi kreatif secara signifikan mengurangi insiden kawasan kumuh melalui peningkatan lapangan kerja dan pendapatan rumah tangga, mengimplikasikan bahwa diversifikasi ekonomi perkotaan merupakan strategi efektif jangka panjang dalam pengentasan kawasan kumuh di negara berkembang.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif yang dikombinasikan dengan metode deskriptif. Pendekatan kuantitatif merupakan suatu orientasi penelitian yang menitikberatkan pada pengolahan data yang berwujud angka atau bersifat numerikal, yang selanjutnya dianalisis menggunakan prosedur statistik yang sesuai. Pada prinsipnya, pendekatan ini digunakan dalam penelitian yang berkarakter inferensial, yakni dalam konteks pengujian hipotesis, di mana penarikan kesimpulan didasarkan pada tingkat probabilitas kesalahan dalam penolakan hipotesis nol (Sudaryana & Agusiady, 2022). Melalui penerapan pendekatan kuantitatif, dapat diidentifikasi tingkat signifikansi perbedaan antarkelompok maupun kekuatan hubungan di antara variabel-variabel yang menjadi objek kajian. Adapun metode deskriptif digunakan sebagai instrumen untuk menggambarkan dan memaparkan kondisi aktual variabel-variabel

penelitian secara sistematis, faktual, dan terukur, sesuai dengan realitas dan fenomena yang dijumpai di lapangan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi linear berganda. Data yang digunakan merupakan data sekunder time series periode 2015-2024 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Makassar.

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Definisi Operasional
Tingkat Urbanisasi (Urban)	Urbanisasi didefinisikan sebagai proses bertambahnya proporsi penduduk yang tinggal di daerah perkotaan akibat perpindahan penduduk dari desa ke kota maupun pertumbuhan alami penduduk kota. Dalam penelitian ini, urbanisasi dioperasionalkan sebagai persentase penduduk yang bermigrasi ke Kota Makassar dan menetap di kawasan perkotaan dibandingkan total populasi setiap tahun, diukur dalam satuan persen (%)
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Tingkat Pengangguran Terbuka menggambarkan persentase penduduk usia kerja yang tidak memiliki pekerjaan namun aktif mencarinya, dibandingkan total angkatan kerja, dan digunakan untuk mengukur sejauh mana pasar kerja Kota Makassar mampu menyerap tenaga kerja yang tersedia. TPT diukur dalam persen (%) menggunakan formula standar BPS: $TPT = (\text{Jumlah Pengangguran} \div \text{Jumlah Angkatan Kerja}) \times 100\%$.
Tingkat Kemiskinan (TK)	Tingkat kemiskinan adalah persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan menurut standar BPS, diukur dalam satuan persen (%), di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan proporsi penduduk miskin yang lebih besar
Luas Kawasan Permukiman Kumuh (SLUM_SQ)	Luas Kawasan Permukiman Kumuh didefinisikan sebagai total area permukiman yang tidak memenuhi standar kelayakan hunian sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2018, yang mencakup tujuh indikator kekumuhan (kondisi bangunan, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, dan proteksi kebakaran), diukur dalam satuan hektare (Ha). Mengingat skala dan sebaran nilai variabel ini jauh berbeda dari variabel independen yang berbentuk persentase, serta untuk memenuhi asumsi normalitas dan homoskedastisitas, data luas kawasan kumuh ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma (Log SLUM_SQ).

Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan metode estimasi *Ordinary Least Squares* (OLS). Metode ini dipilih karena penelitian melibatkan satu variabel dependen kontinu (luas kawasan permukiman kumuh) dan tiga variabel independen (urbanisasi, pengangguran terbuka, dan kemiskinan) yang diduga berpengaruh secara bersamaan, sehingga regresi berganda memungkinkan estimasi besaran pengaruh setiap variabel secara parsial sekaligus secara simultan dalam satu model. Estimator OLS bersifat Best Linear Unbiased Estimator (BLUE) apabila asumsi klasik terpenuhi, sehingga koefisien yang dihasilkan dapat diinterpretasikan secara valid (Ghozali, 2011).

Uji regresi linier berganda dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel tingkat urbanisasi (*urban*), tingkat pengangguran terbuka (*tpt*) dan tingkat kemiskinan (*tk*) berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu luas kawasan permukiman kumuh (*slum_sq*). Model persamaan regresi linear berganda yang digunakan secara umum dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\log SLUM_SQ_t = \alpha + \beta_1 Urban_t + \beta_2 TPT_t + \beta_3 TK_t + e_i$$

Dimana :

LogSLUM_SQ: luas kawasan permukiman kumuh

Urban : tingkat urbanisasi (%)

TPT: tingkat pengangguran terbuka (%)

TK : tingkat kemiskinan (%)

α : konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$: koefisien regresi

e: error term

Sebelum analisis regresi, dilakukan uji asumsi klasik meliputi uji normalitas (Normal P-P Plot), uji multikolinearitas (*Variance Inflation Factor/VIF*), uji heteroskedastisitas (*Scatterplot*), dan uji autokorelasi (Durbin-Watson). Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji *t* (parsial), uji *F* (simultan), dan koefisien determinasi (R^2).

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Hasil penelitian

Statistik Deskriptif

Data penelitian mencakup 10 observasi tahun 2015-2024. Tabel 2 menyajikan data mentah variabel penelitian yang menunjukkan perkembangan luas kawasan kumuh, tingkat urbanisasi, TPT, dan tingkat kemiskinan di Kota Makassar.

Tabel 2. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian (2015–2024)

Variabel	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Std. Deviasi
Luas Kawasan Kumuh (Ha)	299,50	740,10	508,05	153,27
Urbanisasi (%)	4,17	5,06	4,57	0,36
TPT (%)	9,38	15,92	11,64	1,79
Kemiskinan (%)	4,28	5,07	4,62	0,24

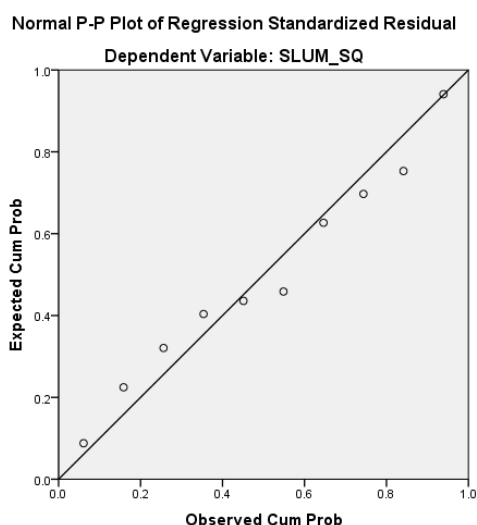
Sumber: BPS, Bappeda, dan Disdukcapil Kota Makassar (data diolah)

Data menunjukkan bahwa luas kawasan kumuh mengalami tren penurunan jangka panjang dari 740,10 Ha (2015) menjadi 299,50 Ha (2024), meskipun sempat meningkat pada 2020 akibat dampak pandemi COVID-19. Tingkat urbanisasi berfluktuasi antara 4,17%-5,06%, TPT antara 9,38%-15,92%, dan tingkat kemiskinan antara 4,28%-5,07%.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah residual dalam model regresi berdistribusi normal. Uji normalitas menggunakan *Normal Probability Plot* menunjukkan bahwa titik-titik residual terstandarisasi cenderung mengikuti garis diagonal, sebagaimana ditunjukkan pada

Gambar 1. Pola tersebut mengindikasikan bahwa penyebaran residual mendekati distribusi normal. Dengan demikian asumsi normalitas terpenuhi sehingga model layak untuk analisis lanjutan.



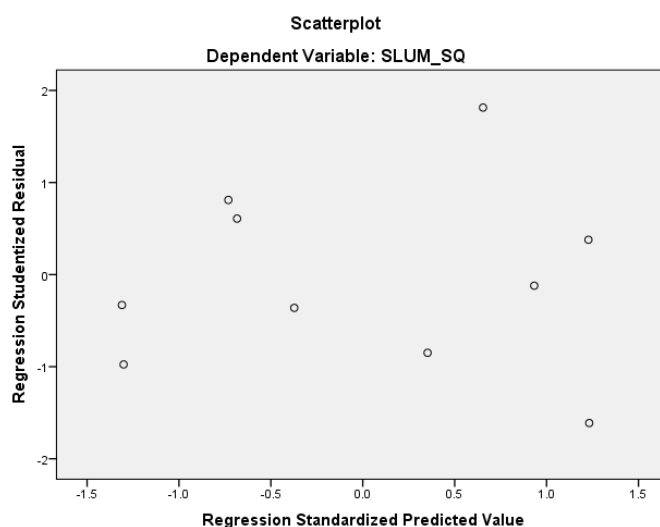
Gambar 1. Hasil Uji Normalitas Data

Selanjutnya, uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi yang tinggi antarvariabel independen dalam model regresi. Hasil uji multikolinearitas disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Urban	0,714	1,401
TPT	0,861	1,162
TK	0,768	1,302

Seluruh variabel memiliki nilai VIF < 10 dan Tolerance > 0,10, sehingga tidak terdapat masalah multikolinearitas.



Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji berikutnya adalah uji heteroskedastisitas yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan varians residual pada setiap nilai prediksi dalam model regresi. Hasil pengujian menggunakan scatterplot disajikan pada Gambar 2. Hasilnya bahwa penyebaran titik-titik pada grafik tersebut tidak membentuk pola dengan jelas dan penyebaran titik-titik pada grafik menyebar dengan sempurna dibawah angka 0 pada sumbu Y. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak adanya masalah dalam uji heteroskedastisitas.

Terakhir, uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara residual pada satu periode dengan residual pada periode lainnya. Pengujian dilakukan menggunakan statistik Durbin-Watson dan hasilnya disajikan pada Tabel 4. Uji autokorelasi menggunakan Durbin-Watson menghasilkan nilai DW = 2,528. Dengan $n = 10$ dan $k = 3$, diperoleh $du = 2,0163$ dan $4-du = 1,9837$. Nilai DW berada pada rentang $4-du < DW < 4-dl$ ($1,9837 < 2,528 < 3,4747$), menunjukkan tidak terdapat autokorelasi dalam model.

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 4. Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Coefficients	Std. Error	t	Sig.
Constant	1,903	0,370	5,145	0,002
Urban	0,285	0,035	8,178	0,000
TPT	0,034	0,006	5,205	0,002
TK	-0,197	0,050	-3,952	0,008
R Square	0,963			
Adjusted R Square	0,945			
F-hitung	52,289			
Sig.	0,000			
Durbin-Watson	2,528			

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{LogSLUM}_{SQ} = 1,903 + 0,285 \text{ Urban} + 0,034 \text{ TPT} - 0,197 \text{ TK}.$$

Persamaan tersebut menunjukkan arah hubungan masing-masing variabel independen dengan luas kawasan permukiman kumuh setelah variabel dependen ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma. Koefisien tingkat urbanisasi dan TPT bernilai positif, sedangkan koefisien tingkat kemiskinan bernilai negatif.

Nilai $R = 0,981$ menunjukkan tingkat hubungan yang sangat kuat antara seluruh variabel independen secara bersama-sama dengan variabel dependen. Nilai $R^2 = 0,963$ mengindikasikan bahwa 96,3% variasi luas kawasan permukiman kumuh dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen, sedangkan 3,7% dipengaruhi faktor lain. Nilai Adjusted $R^2 = 0,945$ menunjukkan model tetap memiliki daya jelas yang tinggi dan stabil setelah penyesuaian.

Untuk mengetahui apakah ketiga variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap luas kawasan permukiman kumuh, dilakukan uji F. Nilai F-hitung (52,289) > F-tabel (4,76) dengan signifikansi $0,000 < 0,05$, sehingga H_0 ditolak.

Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan tingkat urbanisasi, pengangguran terbuka, dan kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap luas kawasan permukiman kumuh.

Selanjutnya, pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial dianalisis menggunakan uji t. Uji t untuk masing-masing variabel disajikan pada Tabel 3 di atas. Tingkat urbanisasi memiliki $t\text{-hitung} = 8,178 > t\text{-tabel} (2,447)$ dengan sig. 0,000, sehingga berpengaruh positif dan signifikan secara parsial. TPT memiliki $t\text{-hitung} = 5,205 > 2,447$ dengan sig. 0,002, sehingga berpengaruh positif dan signifikan. Kemiskinan memiliki $t\text{-hitung} = -3,952$ (absolut $> 2,447$) dengan sig. 0,008, sehingga berpengaruh negatif dan signifikan.

4.2 Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa urbanisasi berperan dalam meningkatkan luas kawasan permukiman kumuh di Kota Makassar. Meningkatnya arus perpindahan penduduk ke wilayah perkotaan menyebabkan kebutuhan akan hunian terus bertambah, sementara penyediaan perumahan dan infrastruktur belum sepenuhnya mampu mengimbangnya. Kondisi tersebut mendorong sebagian masyarakat berpenghasilan rendah tinggal di kawasan dengan kualitas lingkungan yang rendah. Temuan ini sejalan dengan Teori Migrasi Todaro yang menjelaskan bahwa migrasi didorong oleh harapan memperoleh kehidupan yang lebih baik, tetapi keterbatasan kesempatan kerja dan hunian layak dapat memicu berkembangnya permukiman kumuh. Hasil ini juga konsisten dengan penelitian Khatri (2021) yang menyatakan bahwa urbanisasi berkaitan dengan meningkatnya kawasan kumuh akibat tekanan terhadap lahan dan infrastruktur.

Tingkat pengangguran terbuka juga berkontribusi terhadap perkembangan kawasan permukiman kumuh di Kota Makassar. Keterbatasan kesempatan kerja menyebabkan sebagian masyarakat memiliki pendapatan yang rendah sehingga sulit mengakses hunian yang layak. Kondisi ini sesuai dengan Teori Pengangguran Keynes yang menjelaskan bahwa pengangguran terjadi akibat rendahnya penyerapan tenaga kerja dalam perekonomian. Temuan ini didukung oleh penelitian Sabilillah & Robertus (2024) yang menunjukkan bahwa pengangguran dan urbanisasi berkaitan dengan meningkatnya permasalahan sosial ekonomi di kawasan perkotaan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa tingkat kemiskinan memiliki hubungan yang signifikan dengan luas kawasan permukiman kumuh. Hubungan tersebut menunjukkan bahwa perubahan luas kawasan kumuh tidak selalu sejalan dengan perubahan tingkat kemiskinan karena penurunan kawasan kumuh dapat dipengaruhi oleh program penataan dan peningkatan infrastruktur. Temuan ini dapat dijelaskan melalui Teori Kapabilitas Amartya Sen yang memandang kemiskinan sebagai keterbatasan kemampuan individu, bukan hanya rendahnya pendapatan. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian (Krisandriyana et al., 2019) yang menunjukkan bahwa kondisi fisik permukiman dan kondisi ekonomi masyarakat tidak selalu mengalami perubahan secara bersamaan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa urbanisasi, tingkat pengangguran terbuka, dan tingkat kemiskinan merupakan faktor yang saling

berkaitan dalam memengaruhi luas kawasan permukiman kumuh di Kota Makassar. Temuan ini memperkuat teori Todaro, Keynes, dan Amartya Sen bahwa permasalahan permukiman kumuh merupakan fenomena multidimensional yang dipengaruhi oleh aspek demografi, ekonomi, dan sosial. Oleh karena itu, penanganan kawasan kumuh perlu dilakukan secara terpadu melalui pengendalian urbanisasi, penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta peningkatan kualitas permukiman.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan data deret waktu periode 2015-2024 dengan jumlah observasi yang relatif terbatas dan hanya menganalisis tiga variabel independen. Penelitian selanjutnya disarankan menambahkan variabel lain, seperti kepadatan penduduk, investasi infrastruktur, dan kebijakan tata ruang, serta menggunakan periode pengamatan yang lebih panjang agar diperoleh hasil yang lebih komprehensif.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh urbanisasi, tingkat pengangguran terbuka, dan tingkat kemiskinan terhadap luas kawasan permukiman kumuh di Kota Makassar periode 2015-2024, dapat disimpulkan bahwa tingkat urbanisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap luas kawasan permukiman kumuh, di mana meningkatnya arus perpindahan penduduk ke wilayah perkotaan tidak selalu diimbangi dengan ketersediaan hunian yang layak dan terjangkau. Tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap luas kawasan permukiman kumuh karena keterbatasan kesempatan kerja dan pendapatan yang stabil menyebabkan masyarakat berpenghasilan rendah memilih hunian dengan biaya minimum. Tingkat kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap luas kawasan permukiman kumuh di Kota Makassar. Kemiskinan yang bersifat multidimensional dan persisten menyebabkan penduduk tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar akan hunian yang layak, sehingga terkonsentrasi di kawasan-kawasan padat dan tidak terencana yang berkembang menjadi permukiman kumuh. Hubungan negatif ini menunjukkan keberhasilan program KOTAKU dalam menurunkan luas kawasan kumuh secara fisik meskipun tingkat kemiskinan relatif stabil. Secara simultan, tingkat urbanisasi, tingkat pengangguran terbuka, dan tingkat kemiskinan saling berinteraksi dalam memengaruhi luas kawasan permukiman kumuh.

Pemerintah Kota Makassar perlu mengoptimalkan pengendalian urbanisasi melalui pemerataan pembangunan di daerah pinggiran, memperluas lapangan kerja formal dan padat karya, serta memperkuat program pemberdayaan masyarakat dan akses permodalan bagi kelompok berpenghasilan rendah. Penelitian selanjutnya disarankan menambahkan variabel kepadatan penduduk, kualitas infrastruktur, tingkat pendidikan, dan status kepemilikan lahan, dengan metode yang lebih komprehensif seperti data panel, pendekatan spasial (GIS), atau ekonometrika dinamis, serta memperluas cakupan wilayah agar hasil lebih representatif dan dapat digeneralisasikan.

Referensi

- Anwari, C., & Ambariyanto, A. (2024). Dampak Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Kemiskinan Di Kawasan Jabodetabek. *Neo-Bis*, 13(2), 204-218. 10.21107/nbs.v13i2.28904
- Ardian, R., & Syahputra, M., & Desmawan, D. (2022). Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 3(1), 190–198. <https://doi.org/10.58192/ebismen.v1i3.90>
- Badan Pusat Statistika Kota Makassar. (2022). *Kota Makassar dalam Angka*. Badan Pusat Statistika Kota Makassar.
- Badan Pusat Statistika Kota Makassar. (2023). *Kota Makassar dalam Angka 2023*. BPS Kota Makassar.
- Badan Pusat Statistika Kota Makassar. (2024). *Data Kemiskinan Kota Makassar 2019–2024*. BPS Kota Makassar.
- Bank Dunia. (2020). *Urbanization and Poverty in Southeast Asia: Managing Growth for Inclusive Development*. Washington. The World Bank.
- Firman, T. (2019). *Urbanization and Urban Development in Indonesia*. Routledge.
- Ghozali. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hartanto, T. (2025). *Buku Ajar Pengantar Perencanaan Permukiman*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Jacobus, E.H., & Kindangen, P., & Walewangko, E. N. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga di Sulawesi Utara. (2021). *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 19(3), 86-103. <https://doi.org/10.35794/jpekd.32744.19.3.2018>
- Hardiani, J. (2009). *Dasar-Dasar Teori Kependudukan*. Hamada Prima.
- Herawati, N. H., & Mesra, R. (2024). Fenomena Urbanisasi di Kota Yogyakarta sebagai Akar Masalah Sosial. *COMTE: Journal of Sociology Research and Education*, 1(3), 116-128. <https://doi.org/10.64924/018nye08>
- Juniasa, I. D. N., Merta, I. N. & Mertaningrum, N. L. P. E. (2024) Dampak Urbanisasi Bagi Perubahan Sosial Masyarakat Kota Denpasar, *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 13(2), 309-316. <https://doi.org/10.47492/jih.v13i2.3727>
- Khatri, P. R. (2022) Urbanization & Growth of Slums In India: Evidence from Census of India (2001-2011), *Universal Research Reports*, 9(4), 362–371.
- Krisandriyana, M., Astuti, W., & Fitriarini, E. F. (2019). Faktor Yang Mempengaruhi Keberadaan Kawasan Permukiman Kumuh di Surakarta. *Desa-Kota: Jurnal Perencanaan Wilayah, Kota, dan Permukiman*. <https://doi.org/10.20961/desa-kota.v1i1.14418.24-33>
- Meirizal, M. S., Sinaga, D. L., Tinambunan, F. U., Saragi, S. L., & Sitio, V. (2024). Teori Ekonomi Keynesian Mengenai Inflasi dan Pengaruhnya Terhadap Ekonomi Modern. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(2), 2433–2445. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i2.9754>

- Nchange, N. M. A. & Mignamissi, D. (2026). Creative economy and slum incidence in developing countries: Effect and channels. *Growth and Change*, 57(1). <https://doi.org/10.1111/grow.70102>
- Oladehinde, G. J. (2025). Analysis of socio-economic characteristics and physical condition of the slum environment in the inner city. *Urbanization, Sustainability and Society*, 2(1), 47–81. <https://doi.org/10.1108/USS-06-2024-0039>
- Pasaribu. (2020). Pengaruh Jumlah Penduduk dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Tingkat Kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2007–2017. *Doctoral Dissertation*. IAIN Padangsidimpuan.
- Pinontoan, M. (2020). *Konsep Dasar Kemiskinan dan Strategi Pemberdayaan Masyarakat: Suatu Kajian Teoretis, Pragmatis dan Holistik*. Penerbit NEM.
- Rahayu, I., & Jaharuddin, W. A. (2020). Identifikasi Karakteristik Permukiman Kumuh Di Sekitar Taman Maccini Sombala Kota Makassar. *Teknosains: Media Informasi Sains Dan Teknologi*, 14(2), 187–194. <https://doi.org/10.24252/teknosains.v14i2.14433>
- Rahmadana, M. F. (2020). *Teori-Teori Tentang Wilayah dan Migrasi*. Perdana Publishing.
- Rainfil, R. (2022). Improvement of the Environment and Health in Terms of Governance of Slum Settlements through Collaboration Between Stakeholders. *Journal of Management and Administration Provision*, 2(3), 95-104. <https://doi.org/10.55885/jmap.v2i3.229>
- Ramadhany, A. A. (2025). Arahan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Di Bantaran Sungai Sinrijala, Kelurahan Pandang Kota Makassar. *Skripsi*. Universitas Hasanuddin. <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/44006/>
- Sabilillah, J., & Robertus, M. H. (2024). Pengaruh Urbanisasi, Modal Manusia, dan Pengangguran terhadap Kemiskinan Perkotaan di Enam Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2021. *Diponegoro Journal of Economics*, 13(3), 43–53. <https://doi.org/10.14710/djoe.45373>
- Santoso, A. D. (2018). Dampak Kebijakan Upah Minimum Terhadap Migrasi Internal di Sulawesi Selatan. *Sosiohumaniora*, 20(2), 177–187. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v20i2.11142>
- Sari, A. R., & Ridlo, M. A. (2021). Studi literature: Identifikasi faktor penyebab terjadinya permukiman kumuh di kawasan perkotaan. *Jurnal Kajian Ruang*, 1(2), 160-176. <https://doi.org/10.30659/jkr.v1i2.20022>
- Sari, D. A., Qurrata'Ayun, N., & Pratiwi, S. E. (2025). Dampak Permukiman Kumuh Terhadap Kesehatan Dan Lingkungan Di Bantaran Sungai Kota Banjarmasin. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, 3(1), 47-56. <https://doi.org/10.12962/j23373539.v3i2.7290>
- Sudaryana, B., & Agusiady, H. R. R. (2022). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Deepublish.
- Syahrain, R. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Migrasi Komunitas Warga Sulawesi Selatan Ke Kota Ternate. *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, 5(2), 83–100.

- Syawaluddin, S. (2015). Refleksi Atas Pemikiran Amartya Kumar Sen Tentang Ketimpangan dan Kemiskinan. *Al-Buhuts*, 11(1), 1–10. <https://doi.org/10.30603/ab.v11i1.2060>
- United Nations. (2019). *World Urbanization Prospects 2019*. United Nations.
- Todaro, M. P. (1969). A Model of Labor Migration and Urban Unemployment in Less Developed Countries. *The American Economic Review*, 59(1), 138–148.
- Yunus, H. S. (2008). *Dinamika Wilayah Peri-Urban: Determinan Masa Depan Kota*. Pustaka Pelajar.